

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Taman Margasatwa Budaya Kinantan (TMSBK) atau yang lebih dikenal dengan Kebun Binatang Bukittinggi merupakan Lembaga Konservasi yang berfungsi untuk memelihara, merawat dan mengembangbiakan satwa liar sekaligus tempat rekreasi dan pendidikan yang terletak di tengah kota. Kawasan ini merupakan objek wisata unggulan sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi untuk objek wisata berbayar. Pada kawasan ini kita dapat melihat usaha pengelola TMSBK mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan sesuai dengan Visi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan pada kawasan TMSBK memberikan dampak positif dan negatif baik itu dalam tujuan pembangunan maupun keberlanjutan sebagai asal dari paradigma ini.

Peneliti menemukan bahwa dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di kawasan TMSBK memang di pacu untuk mendatangkan wisatawan sebanyak mungkin, hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan TMSBK setiap tahunnya dan mempengaruhi peningkatan PAD Kota Bukittinggi dari sektor pariwisata. Berdasarkan prinsip dasar dimana kerangka politik global, ekonomi, sosial-budaya harus sejalan. TMSBK sedang melakukan revitalisasi dengan membuat grand design pengembangan TMSBK oleh WAZA (World Association of Zoos and Aquariums), SEAZA (Southeast Asian Zoo Association) dan PKBSI (Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia). Dimana revitalisasi ini bertujuan untuk mewujudkan kebun

binatang yang representatif dengan terlindungnya aset bangsa, warisan budaya dan ruang publik yang multidimensional.

Dari tujuan pembangunan, TMSBK melakukan berbagai upaya baik itu dalam melaksanakan salah satu tujuan pembangunan millennium yaitu melestarikan lingkungan dengan menyiapkan dokumen wajib yaitu RKP,RKL dan RKT, walaupun dalam pengelolaan masih terkendala fasilitas pengelolaan seperti pengelolaan limbah, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar lewat upaya penyediaan kios-kios di sekitar kawasan dan maka tujuan pembangunan pada kawasan ini sudah baik dari segi sosial-budaya dan ekonomi karena selain mereka membuka usaha sendiri di sekitar kawasan, secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah anak yang mengenyam pendidikan di Kelurahan Benteng Pasar Atas. Namun, untuk internal pengelolaannya TMSBK masih kekurangan Sumber Daya Manusia yang unggul dan tepat dibidangnya .

Tujuan keberlanjutan pada kawasan ini juga masih belum optimal, karena masih banyak permasalahan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan wisata ini seperti polusi yang dihasilkan dan dampak negatif dari kegiatan pariwisata adalah terjadinya ketimpangan sumber daya yang dapat terjadi apabila ketersediaan sumber daya alam banyak dimanfaatkan oleh pelaku kegiatan wisata. Untuk Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui pada kawasan ini tidak dimanfaatkan oleh pengelola TMSBK maupun wisatawan, karena TMSBK berada di atas terowongan yang dibangun saat masa penjajahan Jepang maka tidak pernah ada kegiatan penggalian atau semacamnya di objek wisata ini. Pada syarat pembangunan yang berkelanjutan TMSBK terbatas penggunaan teknologi untuk mengatasi permasalahan lingkungan

dan masih belum mengadopsi paradigma yang berkelanjutan, seperti fasilitas ARSINUM yang sudah disediakan namun dalam penerapan sistem berdasarkan amanat dari KLKH belum bisa sepenuhnya di adopsi oleh pengelola TMSBK. Untuk meningkatkan daya tarik Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi mengadakan RAKORBANG sebagai media perumusan kebijakan agar kebijakan yang dikeluarkan dapat selaras dan berkesinambungan untuk kawasan TMSBK. Namun, dalam pengintegrasian kebijakan di tingkat lokal dan nasional, Kota Bukittinggi belum memiliki Peraturan Daerah mengenai Kepariwisataaan karena terkendala dengan RIPPARDA yang sudah dirumuskan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi *existing* pariwisata Kota Bukittinggi.

6.2 Saran

1. Pemerintah Daerah bersama DPRD diharapkan segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah agar menjadi dasar kebijakan bagi TMSBK dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan.
2. Pemerintah Daerah melalui OPD terkait diharapkan menjadi fasilitator masyarakat dalam rangka menumbuhkan inspirasi dan inisiatif masyarakat lokal dalam usaha pembangunan kawasan wisata.
3. Usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan fauna, kelestarian flora dan wahana konservasi lain lebih ditingkatkan lagi dengan menjadikan TMSBK sebagai tempat wisata konservasi edukasi dan tempat refreshing yang nyaman seperti pengelola lebih atraktif dengan pengunjung atau melibatkan pengunjung dalam pengenalan satwa.

4. Untuk pengelolaan lingkungan, seperti pengelolaan limbah tidak dilakukan oleh satu orang saja dan untuk kebersihan kandang satwa lebih diperhatikan lagi karena beberapa kandang satwa ada yang tidak memiliki sistem drainase.
5. Meningkatkan sinergisitas dengan masyarakat, pelaku usaha dan OPD terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BAPPEDA dan BKSDA dalam pengembangan kawasan TMSBK.
6. Pada penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana penerapan prinsip pembangunan pariwisata dan berkelanjutan di kawasan TMSBK, untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian terkait dampak dari penerapan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan.

